



Peran Multiaktor dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi

(Studi Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)

Petrus Arselius Mari Sogen^{1*}, Petrus Kase², Ardy Yosafat Pandie³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: ogensegen@gmail.com¹, petrus.kase@staf.undana.ac.id², ardy.pandie@staf.undana.ac.id³

Korespondensi penulis: ogensegen@gmail.com

Abstract. *The eruption of Mount Lewotobi has significantly affected communities in Wulanggintang District, requiring the involvement of multiple actors in disaster management. This study aims to analyze multi-actor roles in implementing disaster management policy through the dimensions of expectation, norm, and performance. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews with 17 purposively selected informants, and document analysis. The data were examined using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while validity was established through source, technique, and time triangulation. The findings show that the local government, BPBD, Social Service, village governments, NGOs, volunteers, media, private sector, and communities performed roles broadly consistent with their functions. Their collaboration supported evacuation, evacuee registration, logistics distribution, emergency education, and psychosocial services. Nevertheless, role gaps remained in early information delivery, evacuation transport, equitable aid distribution, permanent housing, and interagency data integration. Limited personnel, funding, community preparedness, and sociocultural considerations also constrained implementation. The policy was therefore moderately effective but requires stronger early-warning systems, integrated data, institutional capacity, and sustainable socioeconomic recovery.*

Keywords: Collaborative Governance; Disaster Management; Multi-Actor Collaboration; Policy Implementation; Volcanic Eruption.

Abstrak. Erupsi Gunung Lewotobi telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Wulanggintang sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran multiaktor dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan dimensi *expectation*, norma, dan *performance*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 17 informan yang dipilih secara purposif, serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah, BPBD, Dinas Sosial, pemerintah desa, LSM, relawan, media, sektor swasta, dan masyarakat telah menjalankan peran secara relatif sesuai dengan fungsi masing-masing. Kolaborasi tersebut mendukung evakuasi, pendataan pengungsi, distribusi logistik, pendidikan darurat, dan pelayanan psikososial. Namun, masih terdapat kesenjangan peran pada penyampaian informasi, ketersediaan transportasi evakuasi, pemerataan bantuan, pembangunan hunian tetap, dan integrasi data antarlembaga. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan personel, anggaran, kesiapsiagaan masyarakat, serta pertimbangan sosial budaya dalam proses evakuasi. Kebijakan telah berjalan cukup efektif, tetapi memerlukan sistem peringatan dini, basis data terpadu, penguatan kapasitas aktor, dan pemulihan sosial ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Erupsi Gunung Api; Implementasi Kebijakan; Kolaborasi Multiaktor; Penanggulangan Bencana; Tata Kelola Bencana.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia menghadapi risiko bencana yang tinggi karena berada pada pertemuan Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik serta termasuk dalam jalur Cincin Api Pasifik. Kondisi geografis kepulauan, keragaman topografi, dan kepadatan penduduk di kawasan rawan semakin meningkatkan ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan tanah longsor (BNPB, 2023). Sepanjang 2024 tercatat 3.472 kejadian bencana di Indonesia,

sedangkan pada 2025 jumlahnya mencapai 2.919 kejadian (BNPB, 2024; Antara News, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa bencana masih mengancam keselamatan masyarakat, pembangunan daerah, dan stabilitas sosial ekonomi.

Penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menempatkannya sebagai tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas bencana membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan keterlibatan sektor swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, relawan, dan komunitas lokal. Pendekatan *disaster governance* menekankan keterpaduan institusi formal, jaringan sosial, dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana (Tierney, 2012). Kolaborasi lintas sektor juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan kebencanaan karena setiap aktor memiliki sumber daya, kewenangan, dan kemampuan yang berbeda (Sagala et al., 2021).

Salah satu ancaman vulkanik di Indonesia berasal dari Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung ini memiliki dua puncak, yaitu Lewotobi Laki-laki dan Lewotobi Perempuan. Aktivitas Lewotobi Laki-laki meningkat sejak Desember 2023 dan mencapai Level IV atau Awas pada 9 Januari 2024. Erupsi 4 November 2024 mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami cedera. Pada 9 November 2024, gunung tersebut kembali mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar sembilan kilometer (Detik.com, 2024).

Kecamatan Wulanggitang menjadi wilayah yang paling terdampak karena terletak di bawah lereng Gunung Lewotobi. Wilayah seluas 255,96 km² ini terdiri atas 11 desa dan dihuni 15.480 penduduk (BPS Kabupaten Flores Timur, 2025). Erupsi mengakibatkan kerusakan permukiman dan lahan pertanian, gangguan kesehatan, terhentinya kegiatan ekonomi, serta pengungsian penduduk. Dari 10.295 jiwa atau 2.734 kepala keluarga yang terdampak di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura, sebanyak 9.479 jiwa atau 2.527 kepala keluarga berasal dari Wulanggitang (BPBD Kabupaten Flores Timur, 2024).

Pemerintah Kabupaten Flores Timur merespons bencana melalui evakuasi penduduk dari radius bahaya tujuh sampai delapan kilometer, pembentukan pos pengungsian, serta penyediaan logistik, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar. Pada tahap awal tercatat 4.681 pengungsi dari 465 kepala keluarga (Antara News, 2024). Jumlah tersebut meningkat menjadi 7.970 jiwa pada 2025 yang menempati pos lapangan, hunian sementara, serta rumah keluarga dan masyarakat (Pos-Kupang.com, 2025). Penanganannya melibatkan pemerintah, sektor swasta, media, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat.

Keterlibatan multiaktor tersebut belum sepenuhnya berjalan terpadu. Permasalahan masih ditemukan dalam pendataan pengungsi mandiri, pemerataan bantuan, penyebaran informasi evakuasi, pembagian tugas, dan pertukaran data antarlembaga. Kontribusi relawan dan masyarakat juga belum maksimal karena keterbatasan kapasitas dan pelatihan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara ketentuan kebijakan, peran yang diharapkan, dan pelaksanaannya. Lemahnya koordinasi kelembagaan serta kapasitas lokal dapat menghambat implementasi pengurangan risiko bencana (Alexander, 2021), sedangkan efektivitas respons darurat sangat bergantung pada jaringan komunikasi dan aktor penghubung antarlembaga (Kapucu, 2006).

Penelitian terdahulu telah membahas sistem ekologi sosial (Sagala et al., 2021), komunikasi kebencanaan (Aziz et al., 2024), efektivitas kebijakan banjir (Khairina et al., 2024), regulasi risiko tsunami (Akhirianto et al., 2024), dan tata kelola kebakaran hutan (Ruswandi, 2023). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pembagian peran dan kolaborasi multiaktor dalam implementasi kebijakan penanggulangan erupsi gunung api pada tingkat lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran setiap aktor, pola kolaborasi, dan kendala koordinasi dalam penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Peran

Teori peran menjelaskan perilaku aktor berdasarkan kedudukan, tanggung jawab, dan harapan yang melekat pada posisinya dalam suatu sistem sosial. Biddle (1986) memandang peran sebagai seperangkat harapan terhadap perilaku individu atau kelompok yang menempati posisi tertentu. Peran terbentuk melalui hubungan antara aktor, aturan kelembagaan, dan harapan masyarakat. Biddle membagi peran dalam tiga dimensi, yaitu *expectation*, *norm*, dan *performance*. *Expectation* menunjukkan perilaku yang diharapkan dari aktor; *norm* berkaitan dengan peraturan dan standar yang mengarahkan tindakan; sedangkan *performance* menggambarkan pelaksanaan peran secara nyata. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara tanggung jawab formal dan tindakan setiap aktor dalam penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan pemerintah menjadi program dan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan

tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana. Implementasi menjadi tahap penting karena menentukan apakah kebijakan dapat memberikan hasil nyata kepada kelompok sasaran (Winarno, 2014). Mazmanian dan Sabatier (1989, dalam Wahab, 2012) menempatkan implementasi sebagai rangkaian aktivitas dan konsekuensi yang muncul setelah suatu kebijakan disahkan. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara *top-down* melalui arahan pemerintah maupun *bottom-up* dengan mempertimbangkan kondisi pelaksana dan masyarakat di lapangan. Pada dasarnya, implementasi merupakan cara untuk mencapai tujuan kebijakan melalui program atau kebijakan turunannya (Nugroho, 2017).

Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan penanggulangan bencana sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan berisiko bencana, pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan setelah kejadian, tetapi juga mencakup upaya pengurangan risiko sebelum bencana. Carter (2008) membagi manajemen bencana ke dalam empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Tujuannya adalah melindungi kehidupan, harta benda, lingkungan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Alexander (2013) menegaskan bahwa pengurangan risiko memerlukan integrasi regulasi, perencanaan wilayah, dan partisipasi masyarakat agar kebijakan dapat berkelanjutan.

Tata Kelola Kolaboratif dan Multiaktor

Tata kelola kolaboratif merupakan mekanisme yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) mengemukakan empat unsur utama kolaborasi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Proses tersebut dibangun melalui dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Kolaborasi juga membutuhkan pembagian tugas yang jelas agar seluruh aktor bekerja sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan bersama (Nawawi, 1984; Syani, 1994).

Konsep multiaktor merujuk pada keterlibatan pemerintah, sektor swasta, media, organisasi nonpemerintah, relawan, dan masyarakat yang memiliki sumber daya serta kapasitas berbeda. Emerson et al. (2012) menjelaskan bahwa hasil kolektif sering kali hanya dapat dicapai melalui interaksi formal maupun informal antarlembaga. Dalam penanggulangan bencana, jaringan sosial dan kerja sama antaraktor dapat mempercepat respons, memperluas distribusi bantuan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat (Aldrich & Meyer, 2015). Oleh

karena itu, penelitian ini menggunakan dimensi *expectation*, *norm*, dan *performance* untuk menganalisis pelaksanaan peran setiap aktor, sedangkan konsep implementasi dan tata kelola kolaboratif digunakan untuk menilai komunikasi, pembagian tugas, pemanfaatan sumber daya, serta sinergi dalam penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami pengalaman, tindakan, dan hubungan antaraktor dalam suatu fenomena sosial secara mendalam (Creswell, 2018), sedangkan studi kasus digunakan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan dalam konteks yang spesifik (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, karena wilayah tersebut terdampak langsung erupsi Gunung Lewotobi serta memperlihatkan keterlibatan berbagai aktor dalam penanganan bencana.

Fokus penelitian adalah peran multiaktor dalam implementasi kebijakan penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi. Analisis mengacu pada teori peran Biddle yang mencakup tiga dimensi, yaitu *expectation*, *norm*, dan *performance*. Dimensi *expectation* digunakan untuk mengidentifikasi harapan antaraktor, harapan masyarakat, dan kesesuaian tugas dengan fungsi kelembagaan. Dimensi *norm* mencakup dasar hukum, standar operasional prosedur, norma sosial, dan kearifan lokal. Sementara itu, dimensi *performance* digunakan untuk menganalisis tindakan, koordinasi lapangan, dan kesenjangan antara peran yang diharapkan dengan pelaksanaannya.

Informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam penanggulangan bencana (Sugiyono, 2019). Sebanyak 17 informan terdiri atas Camat Wulanggintang, dua kepala desa terdampak dari Desa Kelatanlo dan Pululera, tiga unsur BPBD Kabupaten Flores Timur, satu unsur Dinas Sosial, satu perwakilan media, satu lembaga swadaya masyarakat, satu pihak swasta, satu relawan, empat masyarakat terdampak, dan dua masyarakat tidak terdampak yang berdomisili di Larantuka. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pendukung.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Data sekunder dihimpun dari regulasi, laporan BPBD dan PVMBG, buku, artikel ilmiah, dokumentasi kegiatan, serta publikasi lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk

memperoleh gambaran mengenai pembagian peran, koordinasi, distribusi bantuan, serta kendala yang dihadapi para aktor.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi, dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif dan dalam bentuk tabel apabila diperlukan. Keabsahan temuan diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu dengan membandingkan informasi antar-informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Erupsi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki meningkat sejak akhir 2023, ditandai dengan perubahan status dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), kemudian Level IV (Awat). Erupsi besar terjadi pada 3 November 2024 pukul 23.57 WITA dengan lontaran batu pijar, abu vulkanik, dan awan panas. Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, ternak, dan infrastruktur jalan. Kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perekonomian masyarakat juga terganggu. Sebanyak 9.479 penduduk Kecamatan Wulanggitang tercatat terdampak langsung.

Pemerintah menetapkan status tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BPBD.300.2.2.5/24/BID.KL/XI/2024. Penanganan dilanjutkan melalui Keputusan Bupati Nomor BPBD.300.2.2.5/03/BID.KL/II/2025 serta dua kali perpanjangan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor BPBD.300.2.2.5/04/BID.KL/VII/2025 dan Nomor BPBD.300.2.2.5/06/BID.KL/IX/2025. Perpanjangan dilakukan karena aktivitas gunung masih berada pada Level IV. Kondisi tersebut diperkuat oleh Laporan Badan Geologi Nomor 22/LV/GL.03/BGV/2025 tanggal 13 Februari 2025.

Kebijakan yang dilaksanakan meliputi penetapan zona bahaya, evakuasi penduduk, pembentukan pos pengungsian, pendataan korban, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Lokasi pengungsian ditempatkan di wilayah aman, seperti Konga, Lewolaga, dan Eputobi. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan dan desa, LSM, relawan, media, swasta, dan masyarakat.

Harapan dan Kesesuaian Peran Aktor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktor mengharapkan adanya kerja sama, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas. BPBD dan Dinas Sosial menjadi aktor utama

dalam penanganan, sedangkan pemerintah desa, LSM, relawan, media, swasta, dan masyarakat menjalankan fungsi pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan oleh satu lembaga.

Masyarakat mengharapkan bantuan kebutuhan dasar, tempat pengungsian yang layak, informasi yang cepat, distribusi bantuan yang merata, pembangunan hunian tetap, dan pemulihan mata pencaharian. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya dinilai berdasarkan respons darurat, tetapi juga keberlanjutan pemulihan. Temuan ini sesuai dengan Akhirianto et al. (2024), bahwa masyarakat terdampak membutuhkan kepastian hunian, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi setelah masa tanggap darurat.

Sebagian besar aktor telah menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. BPBD mengoordinasikan evakuasi dan logistik; Dinas Sosial mengelola kebutuhan pengungsi; pemerintah desa menjadi perespons awal; LSM dan relawan menyediakan bantuan kemanusiaan, pendidikan darurat, dan dukungan psikososial; media menyebarkan informasi; swasta memberikan bantuan; sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui gotong royong. Secara formal tidak ditemukan konflik kewenangan yang berarti. Namun, pada pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih bantuan akibat perbedaan data antarlembaga.

Norma dan Pelaksanaan Peran

Penanganan erupsi telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, keputusan kepala daerah, standar operasional prosedur, serta aturan teknis lainnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui enam pos lapangan. Setiap koordinator pos mencatat kebutuhan pengungsi dan menyampaikannya kepada bagian logistik BPBD. Dalam keadaan mendesak, pemerintah kecamatan dan desa juga mengambil keputusan di luar prosedur untuk melindungi keselamatan masyarakat. Tindakan tersebut sesuai dengan pandangan Lipsky (1980) bahwa pelaksana lapangan membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan cepat dalam kondisi darurat.

Selain aturan formal, norma sosial ikut memengaruhi penanggulangan bencana. Budaya gotong royong membantu pelaksanaan evakuasi, pengelolaan dapur umum, dan distribusi bantuan. Namun, sebagian masyarakat menolak dievakuasi sebelum ternaknya diselamatkan. Peringatan peningkatan status gunung juga pernah ditolak karena sebagian warga menganggap aktivitas vulkanik sebagai keadaan biasa atau menghubungkannya dengan pelanggaran adat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi bencana perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Oliver-Smith, 1996).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Kelatanlo dan Plulera mengarahkan warga menuju titik kumpul menggunakan pengeras suara atau seruan langsung. BPBD mengevakuasi

penduduk ke pos pengungsian dan mendata kebutuhan ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, dan lansia. Dinas Sosial mendata pengungsi berdasarkan kelompok usia, sedangkan LSM mendirikan sekolah darurat, termasuk untuk siswa SMP Negeri 1 Wulanggitang, serta memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak. Media menyampaikan informasi dan kebutuhan pengungsi, sementara swasta menyalurkan logistik.

Tabel 1. Ringkasan Pelaksanaan Peran Multiaktor.

Aktor	Pelaksanaan peran	Kendala utama
Pemerintah kecamatan dan desa BPBD	Memberikan informasi, menggerakkan warga, dan mengoordinasikan evakuasi Evakuasi, penyediaan posko, pendataan, dan distribusi logistik	Transportasi dan sarana komunikasi terbatas Keterbatasan personel, anggaran, dan kesamaan data
Dinas Sosial	Pengelolaan pengungsi dan kebutuhan dasar	Satu posko melayani lebih dari 800 orang
LSM dan relawan	Bantuan kemanusiaan, sekolah darurat, dan dukungan psikososial	Data penerima bantuan berbeda dengan data pemerintah
Media	Menyebarkan informasi dan kebutuhan pengungsi	Informasi belum menjangkau seluruh wilayah
Swasta	Menyalurkan logistik dan kebutuhan dasar	Bantuan masih bersifat insidental dan belum terkoordinasi
Masyarakat	Membantu evakuasi dan pengelolaan pengungsian	Kesiapsiagaan rendah dan sebagian menolak evakuasi

Sumber: Data penelitian, diolah peneliti, 2026.

Kesenjangan Peran dan Faktor Penghambat

Berdasarkan teori Biddle (1986), terdapat kesenjangan antara peran yang diharapkan dan pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut terlihat pada keterlambatan informasi, keterbatasan kendaraan evakuasi, belum meratanya bantuan, perbedaan data pengungsi, dan tertundanya pembangunan hunian tetap. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja aktor, tetapi juga keterbatasan sumber daya dan situasi bencana yang sulit diperkirakan.

Penelitian menemukan enam faktor penghambat. Pertama, koordinasi dan penyamaan data antarlembaga belum optimal sehingga terjadi tumpang tindih bantuan. Kedua, jumlah personel, kendaraan, logistik, dan anggaran masih terbatas. Ketiga, jaringan komunikasi dan penyampaian informasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Keempat, pengetahuan dan kesiapsiagaan sebagian warga masih rendah. Kelima, trauma, ikatan adat, dan keraguan terhadap relokasi mempersulit pemulihan. Keenam, pemulihan ekonomi belum maksimal karena pemerintah masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan sebagian besar masyarakat kehilangan lahan pertanian dan ternak.

Secara umum, kolaborasi multiaktor telah membantu proses evakuasi, pelayanan pengungsi, dan distribusi bantuan. Namun, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, terutama dalam pengelolaan data dan program pemulihan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan Ruswandi (2023) mengenai pentingnya kerja sama lintas sektor serta Khairina et al.

(2024) tentang perlunya sistem informasi terpadu. Oleh karena itu, diperlukan satu basis data pengungsi, sistem komunikasi risiko berbasis desa, penyediaan transportasi darurat, percepatan hunian tetap, serta program pemulihan pertanian dan peternakan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Wulanggitang telah melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Dinas Sosial, pemerintah desa, sektor swasta, media, LSM, relawan, dan masyarakat. Berdasarkan dimensi *expectation*, *norm*, dan *performance* dalam teori peran Biddle (1986), keterlibatan multiaktor tersebut tergolong cukup efektif karena terdapat kesamaan harapan untuk bekerja sama, dukungan regulasi dan SOP yang jelas, serta tindakan nyata berupa evakuasi, pendataan pengungsi, distribusi logistik, pendidikan darurat, dan pelayanan psikososial. Gotong royong dan solidaritas masyarakat turut memperkuat pelaksanaan kebijakan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam penyampaian informasi, ketersediaan transportasi evakuasi, pemerataan bantuan, pembangunan hunian tetap, dan sinkronisasi data. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, personel, sarana, serta kompleksitas koordinasi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Saran

Pemerintah daerah bersama seluruh aktor perlu memperkuat sistem peringatan dini, menyediakan transportasi evakuasi dan logistik yang memadai, menambah kapasitas personel, serta membangun satu basis data pengungsi dan penerima bantuan agar pelayanan lebih cepat dan merata. Sosialisasi dan pendidikan kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, media, LSM, dan relawan serta mempertimbangkan kearifan lokal agar masyarakat lebih mudah menerima arahan evakuasi. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan hunian tetap dan pemulihan mata pencaharian masyarakat, disertai evaluasi koordinasi secara berkala agar penanggulangan bencana berikutnya lebih terintegrasi, responsif, dan adil.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi: Skematika, teori, dan terapan*. Bumi Aksara.
- Akhirianto, N. A., Ma'rufatin, A., Wardani, K. S., Kongko, W., & Kayadoe, F. J. (2024). Peran regulasi pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana: Evaluasi atas kebijakan peraturan daerah dalam pengurangan risiko bencana tsunami di Kota Ambon. *Jurnal Kawistara*, 14(3), 303–321. <https://doi.org/10.22146/kawistara.89353>

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Alexander, D. E. (2013). Resilience and disaster risk reduction: An etymological journey. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 13(11), 2707–2716. <https://doi.org/10.5194/nhess-13-2707-2013>
- Alexander, D. E. (2021). On evidence-based practice in disaster risk reduction. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(6), 919–927. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00381-3>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- ANTARA. (2024, November 9). Aktivitas vulkanik meningkat, zona bahaya erupsi Lewotobi Laki-Laki diperluas. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7629743/aktivitas-vulkanik-meningkat-zona-bahaya-erupsi-lewotobi-laki-laki-diperluas>
- Aziz, M. H., Prasetyo, D., Putranto, T. D., & Arif, L. (2025). Local mass media and multi-stakeholders as leading sector in disaster communication at the community level. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 78–90. <https://doi.org/10.33822/jep.v8i1.9705>
- Badan Geologi. (2025, February 13). *Laporan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki* (Laporan No. 22/LV/GL.03/BGV/2025) [Laporan teknis]. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2023*. <https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2023/mobile/index.html>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Data bencana Indonesia 2024*. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan. https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buku%20Data%20Bencana%202024/20250613_Buku%20Data%202024.pdf
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. (2024). [Rekapitulasi data masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura]. *Data internal tidak dipublikasikan*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur. (2025). *Kecamatan Wulanggintang dalam angka 2025* (Publikasi No. 53090.25006). <https://florestimurkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/dad1138beab624a29dcd3dbc/kecamatan-wulanggintang-dalam-angka-2025.html>
- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Carter, W. N. (2008). *Disaster management: A disaster manager's handbook*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/disaster-management-disaster-managers-handbook>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Kapucu, N. (2006). Interagency communication networks during emergencies: Boundary spanners in multiagency coordination. *The American Review of Public Administration*, 36(2), 207–225. <https://doi.org/10.1177/0275074005280605>
- Keda, O. (2025, October 21). Gunung Lewotobi Laki-Laki berstatus Awas. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/6191140/gunung-lewotobi-laki-laki-berstatus-awas>
- Khairina, S. H., Hans, A., & Arif, I. A. (2024). Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dalam konteks pembangunan daerah: Studi kasus Kota Makassar. *Development Policy and Management Review*, 4(2), 107–128. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v4i2.36264>
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nawawi, H. (1984). *Administrasi pendidikan* (Cet. ke-3). Gunung Agung.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy* (Edisi ke-6). PT Elex Media Komputindo.
- Nuka, F. M. (2024, January 7). Jumlah warga terdampak erupsi di Flores Timur mencapai empat ribu jiwa. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/3904053/jumlah-warga-terdampak-erupsi-di-flores-timur-mencapai-empat-ribu-jiwa>
- Oliver-Smith, A. (1996). Anthropological research on hazards and disasters. *Annual Review of Anthropology*, 25, 303–328. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.25.1.303>
- Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2024). *Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BPBD.300.2.2.5/24/BID.KL/XI/2024* [Keputusan tentang status tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki].
- Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2025a). *Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BPBD.300.2.2.5/03/BID.KL/II/2025* [Keputusan tentang status tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki].
- Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2025b). *Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BPBD.300.2.2.5/04/BID.KL/VII/2025* [Keputusan tentang perpanjangan status tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki].
- Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2025c). *Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BPBD.300.2.2.5/06/BID.KL/IX/2025* [Keputusan tentang perpanjangan status tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki].
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Ruswandi, D. (2023). Collaborative governance on natural disaster management: A study on forest and land fires in Central Kalimantan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 387–398. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1813>
- Sagala, D. A., Wike, W., & Danar, O. R. (2021). Analisis implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perspektif sistem-ekologi sosial. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.1>

- Selly, S. (2024, November 4). Dampak erupsi Gunung Lewotobi: 10 tewas–53 luka, 2.384 rumah rusak. *detikBali*. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7622303/dampak-erupsi-gunung-lewotobi-10-tewas-53-luka-2-384-rumah-rusak>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-19). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tierney, K. (2012). Disaster governance: Social, political, and economic dimensions. *Annual Review of Environment and Resources*, 37, 341–363. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-020911-095618>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Cet. ke-2). CAPS.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zulfikar, M. (2025, November 25). BNPB laporkan sebanyak 2.919 kejadian bencana hingga November 2025. *ANTARA News*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/728985/bnpb-laporkan-sebanyak-2919-kejadian-bencana-hingga-november-2025>